



PERPUSTAKAAN DESA: PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN UPAYANYA DITINJAU DARI MODEL PENTA HELIX

Annisa Rahmadanita^{1,2}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²corresponding author: anis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The implementation of social inclusion-based village libraries is expected to encourage the improvement of village community welfare, but since 2018 the program was launched by the government, there are still village libraries that have not been transformed based on social inclusion. This study was conducted to obtain an overview and describe the problems, challenges and implementation efforts in the village in terms of the penta helix model. This study is a literature study and the authors collect data through published journal articles, books, and news portals that are relevant to the object of study. Data analysis was carried out through content analysis. The results of the study indicate that the problems faced by the village library include limited budget, inadequate human resources, inadequate supporting facilities and infrastructure, management and development of village libraries that are less than optimal. On the other hand, the challenges faced by village libraries are the rapid development of technology in the implementation of village libraries based on social inclusion. Efforts that can be made in the implementation of social inclusion-based libraries are synergy, harmonization and collaboration between elements of academia, the private sector, government, society and the media. In conclusion, the village library is a part of the picture of a village community. As for the regional level, libraries still face various kinds of problems and other challenges, as well as village libraries facing much more complex problems. Therefore, an approach from various parties is needed through the penta helix model in dealing with challenges and overcoming these problems.

Keywords: Social Inclusion, Penta Helix Model, Village Library.

ABSTRAK

Penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun sejak tahun 2018 program tersebut diluncurkan oleh pemerintah, masih terdapat perpustakaan desa yang belum bertransformasi berbasis inklusi sosial. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan mendeskripsikan tentang permasalahan, tantangan dan upaya penyelenggaraan perpustakaan desa ditinjau dari model penta helix. Kajian ini merupakan

Copyright (c) 2022 Annisa Rahmadanita



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0
International License.

studi kepustakaan dan penulis mengumpulkan data melalui artikel jurnal publikasi, buku, dan portal berita yang relevan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi perpustakaan desa diantaranya terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan desa yang kurang optimal. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi perpustakaan desa adalah berkembangnya teknologi yang begitu cepat dalam penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah dengan sinergitas, harmonisasi dan kolaborasi antara elemen akademisi, pihak swasta, pemerintah, masyarakat dan media. Kesimpulannya, perpustakaan desa merupakan suatu bagian dari gambaran suatu komunitas desa. Adapun pada level daerah, perpustakaan masih menghadapi berbagai macam permasalahan dan tantangan lainnya, begitupula dengan perpustakaan desa menghadapi permasalahan yang jauh lebih kompleks. Oleh karenanya diperlukan pendekatan dari berbagai macam pihak melalui model penta helix dalam menghadapi tantangan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Inklusi Sosial, Model Penta Helix, Perpustakaan Desa.

PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai penyedia berbagai sumber informasi dituntut untuk dapat beradaptasi pada era digital saat ini. Mendukung penyelenggaraan perpustakaan, maka dibutuhkan peran dari pemerintah. Sebagaimana amanat yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu jenis perpustakaan yang memiliki berbagai fungsi dan berdampak secara luas dalam kehidupan masyarakat adalah jenis perpustakaan umum. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan salah satu elemen dari perpustakaan umum adalah hadirnya perpustakaan desa pada setiap desa/kelurahan.

Perpustakaan desa dapat didefinisikan sebagai sarana pendukung pendidikan yang terintegrasi dengan pembangunan desa (Asnawi, 2015). Perpustakaan desa berperan dalam penyediaan dan pemberian berbagai sumber informasi bagi masyarakat desa. Koleksi yang dimiliki perpustakaan desa

diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan (Widayanto & Jatiadi, 2020), mendukung pemberdayaan masyarakat (Maskurotunitsa & Rohmiyati, 2016) bahkan dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. (Indriyanti & Ahwan, 2021). Hakikatnya, perpustakaan desa merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat desa agar dapat berpikir, belajar, bekerja, berkarya dan berprestasi dalam kehidupan sehari-hari (Sutarno, 2006). Dalam perkembangannya, perpustakaan desa pun diharapkan dapat bertransformasi dalam rangka menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan dari perkembangan zaman.

Transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional, yang diharapkan dapat mendorong perubahan inovatif dalam penyelenggaraan perpustakaan desa di Indonesia. Hakikat dari transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tidak hanya menjadikan perpustakaan desa sebagai penyedia sumber informasi tetapi juga mempersiapkan perpustakaan desa agar dapat turut serta memberdayakan dan mendemokratisasikan masyarakat dan

komunitas sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Haryanti, 2019). Melalui fasilitas perpustakaan desa maka dapat mendorong masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki, dan meningkatkan komitmen masyarakat agar mau meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, melalui program transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, maka perpustakaan desa dapat menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk membudayakan gemar membaca, melakukan *update* informasi, dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan terkait suatu produk sesuai potensi masyarakat (Diana, 2022)

Merujuk pada data Perpustakaan Nasional, bahwa sejak tahun 2018 program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan, diketahui bahwa terdapat sejumlah 164.610 perpustakaan yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, perpustakaan yang sudah bertransformasi baru sejumlah 2.900 perpustakaan. Sementara itu, terdapat sejumlah 1.250 perpustakaan desa yang sudah bertransformasi di Indonesia (Merdeka, 2021). Artinya, sebagian besar perpustakaan desa masih perlu didorong agar dapat bertransformasi dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat desa. Di sisi lain, terdapat akar permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan desa, diantaranya berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa yang kurang mempedomani konsep ideal yang berbasis demografi, masih terdapat banyak tahapan/prosedur pengembangan perpustakaan yang tidak diperhatikan diantaranya mengenai tahapan/prosedur kajian kebutuhan pengguna, kajian pemetaan profil masyarakat desa, dan evaluasi kompetensi petugas perpustakaan desa (Musa, 2019).

Kajian yang membahas perpustakaan desa cukup banyak ditemui. Pengelolaan perpustakaan desa berbasis administrasi pendidikan dapat diterapkan dengan menerapkan fungsi manajemen (Sukoco, 2019). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam terdapat perpustakaan desa yang belum optimal dalam menyelenggarakan perpustakaan desa sesuai standar nasional Perpustakaan Nasional, yang dapat diukur dari belum strategisnya lokasi perpustakaan, kepemilikan gedung perpustakaan, dan jam buka layanan yang belum memenuhi kebutuhan pemustaka (Frandyana, 2021). Oleh sebab itu dibutuhkan peran dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan perpustakaan desa. Peran pemerintah desa dapat diwujudkan melalui peran sebagai motivator, dalam memberikan motivasi bagi masyarakat untuk peningkatan gemar membaca; peran sebagai fasilitator, dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pemustaka; peran sebagai mobilisator, dalam mendukung serangkaian kebutuhan penyelenggaraan perpustakaan desa (Yuliasri, 2021). Perpustakaan desa yang berhasil menyelenggarakan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dapat ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu komitmen kuat dari pengelola perpustakaan dan masyarakat; serta adanya keterlibatan masyarakat desa dalam memberdayakan dirinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan (Rachman et al., 2019). Perpustakaan desa yang bertransformasi dapat terjadi dalam segi fungsi dan fasilitas sebagaimana yang ditemukan oleh Zulfah & Aisa (2018) bahwa dari segi fungsi, penyelenggaraan perpustakaan desa menerapkan *streamlining*, ekspansi dan inovasi sedangkan dari segi fasilitas, maka perpustakaan desa melakukan penyediaan bangunan yang layak dan penyediaan teknologi informasi yang memadai. Salah satu penyediaan teknologi informasi yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah adanya desain sistem informasi perpustakaan desa (Suprihatin, 2021). Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan akses internet dan koleksi bacaan yang disediakan perpustakaan desa tidak hanya sebagai sarana membaca tetapi juga sebagai sarana belajar dalam memberdayakan dirinya (Rohman et al., 2018). Oleh sebab itu perpustakaan desa yang telah bertransformasi berbasis inklusi sosial dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakatnya. Dua dampak signifikan yang dapat dirasakan masyarakat desa adalah: 1) terwujudnya literasi informasi yang meningkat, diukur dari nilai sekolah yang bagus dan bertambahnya pengetahuan masyarakat; dan 2) terjadinya kesejahteraan yang meningkat yang dapat diukur dari pendapatan dan kesehatan yang meningkat, serta masyarakat dapat memperoleh pekerjaan (Wulansari et al., 2021). Tercatat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa diantaranya melalui optimalisasi koleksi, jam buka layanan sesuai kebutuhan pemustaka, program penyuluhan terkait manfaat membaca, penyediaan taman baca pada level rukun warga, dan penyelenggaraan lomba serta layanan antar jemput koleksi perpustakaan (Hemanto, 2015)

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengkaji pengembangan perpustakaan desa secara praktis, sementara itu dalam kajian ini, peneliti berupaya memberikan hasil penelitian yang berbeda, yaitu peneliti menganalisis penyelenggaraan perpustakaan desa yang didasari pada konsep model penta helix. Oleh sebab itu, peneliti dapat menyatakan bahwa kajian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan mendeskripsikan tentang permasalahan, tantangan dan

upaya penyelenggaraan perpustakaan desa ditinjau dari model penta helix.

METODE

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data Pustaka, membaca, melakukan pencatatan, dan melakukan pengolahan bahan penelitian (Zed, 2004). Penelitian Kepustakaan melakukan kajian secara teoritis setiap fenomena yang berkembang (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui sumber informasi yang ada dalam jurnal publikasi, buku maupun portal berita yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Prosedur analisis isi yang dilakukan bertujuan dalam memberikan fakta berkaitan dengan objek penelitian yaitu perpustakaan desa, melalui beberapa artikel atau hasil penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Permasalahan pertama yang dihadapi oleh perpustakaan desa adalah terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan perpustakaan desa (Albab & Randika, 2022; Ramayanti, 2021). Terbatasnya anggaran berdampak pada perpustakaan desa belum memiliki Gedung atau bangunan khusus perpustakaan, koleksi perpustakaan yang kurang memadai baik secara jumlah maupun kualitas, sumber daya manusia yang kurang memadai, peralatan dan sarana prasara mendukung lainnya yang kurang memadai. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum dikenalnya perpustakaan desa secara luas (Asnawi, 2015). Artinya, masyarakat desa belum mengetahui bahwa disekitar tempat tinggalnya terdapat perpustakaan desa yang menyediakan berbagai koleksi bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah ataupun pekerjaan.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah perpustakaan desa dikelola oleh sumber daya manusia yang kurang memadai (Kristyanto et al., 2022). Sumber daya manusia kurang profesional menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan perpustakaan desa (Rodiah et al., 2018). Sehingga tidak jarang, perpustakaan desa berfungsi sebagai pajangan dan pengunjungnya kurang dari yang diharapkan. Sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi juga menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa (Asnawi, 2015). Akses informasi yang sulit disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan teknologi. Selain itu, masyarakat desa juga belum mengetahui cara memanfaatkan perpustakaan desa tersebut.

Pembinaan perpustakaan desa belum diselenggarakan secara optimal. Pembinaan perpustakaan desa perlu dilakukan agar penyelenggaraan perpustakaan desa dapat sesuai dengan harapan. Pembinaan perpustakaan desa juga dinilai dapat mempertahankan eksistensi dari perpustakaan desa (Sari & Rohmiyati, 2017). Manfaat perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tidak hanya menjadikan perpustakaan sebagai wadah yang dipenuhi koleksi buku tetapi menunjukkan bahwa perpustakaan desa memiliki berbagai manfaat lebih lainnya yaitu dapat mendorong perubahan dalam diri masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mardiyanto, 2020). Oleh sebab itu, pembinaan perpustakaan desa pada level pusat dan level daerah perlu dilakukan secara berkala, sistematis dan berkelanjutan agar manfaat penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

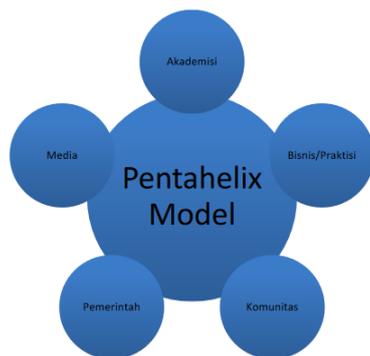
2. Tantangan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Perkembangan teknologi memberikan sebetulnya bukan hanya tantangan tetapi juga peluang dalam penyelenggaraan perpustakaan desa. Diantara contohnya adalah perkembangan buku digital. Dengan adanya buku digital, setiap orang tidak perlu untuk meminjam buku fisik tetapi orang tersebut dapat membaca buku digital. Hal ini yang kemudian berpotensi menurunkan kecenderungan masyarakat untuk datang ke perpustakaan desa. Lebih jauh lagi perkembangan internet membuat buku digital dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Oleh sebab itu, hal tersebut lebih jauh lagi mendorong masyarakat untuk tidak mendatangi perpustakaan secara fisik sehingga seringkali dijumpai perpustakaan yang tidak berpengunjung. Lantas, hal ini dapat dilihat sebagai suatu masalah sekaligus juga sebagai solusi. Yang pertama hal tersebut dianggap sebagai suatu masalah jika perpustakaan desa sangat berharap untuk didatangi pengunjung secara fisik terlepas apapun alasannya. Adapun diantara sebab masyarakat datang ke perpustakaan secara fisik adalah untuk berguru, mencari mentor dan menimba ilmu secara sistematis. Menarik bahwasanya perpustakaan universitas cenderung memiliki tingkat pengunjung yang tinggi dan konsisten dibandingkan dengan perpustakaan desa. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan teknologi tersebut menjadi suatu tantangan bagi perpustakaan desa dimana jika dibandingkan dengan kondisi universitas, perpustakaan desa memiliki faktor tertentu yang membuatnya kurang diminati oleh masyarakat desa. Pertama, kondisi masyarakat desa yang identik dengan keterbelakangan dari segi perekonomian membuat masyarakat desa sibuk bekerja ketimbang untuk melirik dan membaca buku apalagi datang ke perpustakaan secara fisik. Kedua, kondisi pedesaan

yang identik dengan keterbelakangan pemikiran, yang identik dengan keterbelakangan teknologi membuat masyarakat harus kerja lebih keras untuk mendapatkan sumber ilmu yaitu buku dan harus mendatangi perpustakaan secara fisik. Ketiga, perpustakaan desa kurang diminati karena cenderung rendahnya tingkat literasi masyarakat desa.

3. Upaya Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Penta Helix merupakan suatu strategi yang berkembang dari Triple Helix dan Quadruple Helix. Pada model penta helix, mengintegrasikan lima pemangku kepentingan. Kelima pemangku kepentingan ini saling berkaitan satu sama lain. Model penta helix memadukan proses antar pemangku kepentingan yaitu *academic*, *business*, *community*, *government* dan *media* (Yunas, 2019). Model penta helix merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaitannya dengan penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan, maka model penta helix dapat diterapkan oleh pemerintah bersama dengan keempat elemen lainnya.



Gambar 1. Penta Helix Model

Berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dapat menerapkan strategi penta helix dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Model penta helix dalam penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial mengedepankan

kolaborasi dan sinergitas antara kelima elemen berikut ini.

a) *Academic*

Elemen pertama yaitu akademisi. Akademisi yang dimaksudkan adalah akademisi yang berada di bawah lingkungan universitas. Penyelenggaraan perpustakaan desa sebagai salah satu elemen penting dari perpustakaan umum daerah perlu mendapat perhatian dari para akademisi yang ada di kabupaten/kota tersebut. Akademisi berperan sebagai konseptor. Akademisi diharapkan dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang serba cepat saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis inklusi sosial. Peran dari akademisi dapat ditunjukkan melalui perumusan peta perjalanan pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Peta tersebut dapat berisikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta hasil yang diharapkan dari perpustakaan desa di daerah.

b) *Business*

Sektor bisnis yang lebih dikenal dengan sebutan sector swasta merupakan elemen kedua dalam model penta helix. Sektor swasta berperan sebagai enabler yang dapat menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal.

c) *Community*

Komunitas sebagai elemen ketiga dalam penta helix berperan sebagai akselerator. Komunitas menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan

desa berbasis inklusi sosial. Komunitas dapat terdiri dari sekelompok anggota masyarakat yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama dalam memajukan desa sekaligus masyarakat desa melalui keberadaan perpustakaan desa. Komunitas dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

d) *Government*

Pemerintah sebagai elemen keempat dalam penta helix berperan sebagai regulator, pengawas dan koordinator. Pemerintah sebagai regulator berperan dalam pembuatan kebijakan secara tertulis. Sebagai pengawas, pemerintah bertanggungjawab atas perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan perpustakaan desa. Sebagai koordinator, pemerintah merupakan elemen yang memimpin terselenggaranya perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

e) *Media*

Media sebagai elemen kelima dalam penta helix berperan sebagai expender. Media hadir dalam mempromosikan perpustakaan desa hingga dapat dikenal secara luas. Promosi yang dilakukan oleh media dapat membentuk *image* atau *branding* perpustakaan desa. Media juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial menggunakan

model penta helix adalah adanya sinergitas, kolaborasi dan harmonisasi. Berikut analisis penulis mengenai konsep Penta Helix dalam penyelenggaraan perpustakaan desa.

a) *Government*

Mengingat penta helix model menawarkan keterhubungan fungsi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan tertulis telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur perpustakaan umum daerah sebagai salah satu jenis perpustakaan di Indonesia. Lebih lanjut terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Rencana Kerja melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perencanaan kerja pemerintah 2019, bahwa perkembangan perpustakaan pada tahun 2019 harus mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, serta terdapat Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan. Merujuk pada berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat menginformasikan bahwa pemerintah telah berperan sebagai regulator dalam penyelenggaraan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan.

Permasalahan yang umumnya terjadi dalam penyelenggaraan perpustakaan desa adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah

desa untuk membangun gedung perpustakaan dan menyediakan koleksi perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ada pada dana desa. Sumber pendanaan lainnya dapat melalui swadaya masyarakat desa/kelurahan dan bantuan pemerintah APBN/APBD.

Penyelenggaraan perpustakaan desa menggunakan dana desa merupakan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa setempat. Oleh sebab itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses penyelenggaraannya. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah perlu melakukan pengawasan atas kinerja dari pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tersebut.

Upaya penting yang perlu diperhatikan adalah dalam penyediaan Gedung atau bangunan khusus perpustakaan desa dapat dibangun secara bertahap. Penyediaan koleksi perpustakaan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya juga dapat dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan prioritas anggaran dari pemerintah daerah. Sebelum memiliki Gedung atau bangunan khusus perpustakaan, maka perpustakaan desa dapat menyatu dengan balai desa atau kantor desa. Ruang khusus yang disediakan sebagai perpustakaan desa tersebut perlu dipromosikan secara luas kepada masyarakat desa setempat. Berkaitan dengan penyediaan koleksi perpustakaan desa, sebagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, secara berkala Perpustakaan Nasional akan memberikan hibah kepada perpustakaan desa terkait dengan koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa (Merdeka, 2022). Pemerintah pusat juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan perpustakaan desa. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya

untuk mengukur pencapaian tujuan dan manfaat perpustakaan desa tetapi juga untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perpustakaan desa. Sementara itu pemerintah daerah dapat berperan sebagai pembina dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tersebut.

Selain peran dari pemerintah pusat, dibutuhkan peran sentral lainnya dalam menyelenggarakan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yaitu peran dari pemerintah desa setempat. Pemerintah desa sebagai koordinator diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam menyelenggarakan perpustakaan desa. Anggaran yang bersumber dari dana desa juga dapat diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam jajaran pemerintahan desa. Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan perpustakaan desa.

b) Business

Sektor bisnis berperan sebagai enabler. Wujud konkrit enabler tersebut diantaranya ada pada pemberian fasilitas bagi masyarakat khususnya apda perpustakaan desa. Misalnya, dalam program *corporate social responsibility* yang terdapat pada lembaga swasta mampu diantaranya memberikan berbagai bentuk sumbangan berupa rak-rak buku, alat tulis, serta komputer, dan berbagai perangkat keras dan lunak terkait. Dari titik tersebut tentunya mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan perpustakaan khususnya pada level desa. Pada konsep kedua mengenai infrastruktur, pihak swasta mampu memberikan kontribusi berupa sak semen contohnya, dengan bentuk kerjasama dengan pemerintah terkait untuk membangun perpustakaan desa.

Kerjasama seperti ini juga dilakukan di luar negeri dalam rangka pembangunan proyek-proyek pemerintah diantaranya proyek kereta api di negara Inggris yang dilakukan atas kerjasama pihak pemerintah dengan pihak swasta. Selanjutnya pihak swasta dapat berperan sebagai pemberi modal bagi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan desa dengan kekuatan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pihak swasta mampu memberikan sedikit atau banyak berupa bantuan pada pembangunan perpustakaan desa baik fisik maupun non fisik. Pembangunan non fisik dapat berupa pembangunan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi diantaranya komputer. Untuk mewujudkan itu membutuhkan biaya dalam hal gaji, rekrutmen, pendidikan, pelatihan sumber daya manusia di desa.

c) *Academic dan Community*

Perpustakaan desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa dan jajarannya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan perpustakaan desa. Oleh sebab itu, dalam fungsi ini dibutuhkan kolaborasi pemerintah desa dengan akademisi dan komunitas. Akademisi merupakan seseorang yang ahli dalam aspek konseptual dapat menyusun peta kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menyelenggarakan perpustakaan desa. Melalui peta kebutuhan tersebut maka dapat mendorong pemerintah desa untuk merekrut pustakawan atau tenaga ahli baik dari komunitas maupun akademisi untuk mendukung operasional kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan desa. Seringkali ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah desa dan pihak swasta, dalam hal ini komunitas memiliki peran yang sentral diantaranya seperti menghubungkan pihak lain. Komunitas baca yang ada biasanya mampu memenuhi ruang-ruang kosong yang ada

di tengah masyarakat seperti ketiadaan masyarakat disaat hari libur atau diluar jam kerja. Dimana pada komunitas tertentu, membuka dirinya bagi masyarakat desa.

Masyarakat sebagai penerima manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya dalam urusan wajib perpustakaan, memiliki peran dan kontribusi yang besar pula. Masyarakat berperan dalam terlibat secara aktif memberikan dukungan berupa pikiran, maupun tenaga. Masyarakat wajib turut serta dalam pemeliharaan fasilitas perpustakaan desa.

d) *Media*

Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah desa terkait dengan kebutuhan koleksi dan jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pada fungsi keterlibatan masyarakat ini dibutuhkan sinergitas dengan media. Pemanfaatan media dapat dilakukan baik secara konvensional maupun secara *online*. Media sebagai wadah promosi dan pemasaran perpustakaan desa diharapkan dapat menyebarluaskan keberadaan perpustakaan desa, jenis layanan dan program apa saja yang disediakan oleh perpustakaan desa. Berkaitan dengan kebutuhan pemustaka, program yang perlu disediakan adalah kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa, pemenuhan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan potensi masyarakat desa, dan layanan khusus bacaan anak sekolah sesuai dengan kurikulum sekolah. Program dan kegiatan perpustakaan desa perlu dirumuskan secara sistematis dan berorientasi pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program dan kegiatan perlu dibuat secara menarik agar dapat mendorong minat masyarakat untuk mau terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan perpustakaan desa.

Merujuk uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap aktor atau elemen

memiliki peran masing-masing yang terdapat baik persamaan maupun perbedaannya. Sehingga dari aspek yang berisikan tersebut perlu dilakukan duduk bersama, berkoordinasi dan berkolaborasi pada aspek-aspek yang memiliki peran sentral atau utama yang tidak dimiliki oleh aktor/elemen lainnya. Sehingga perlu dipahami bahwa permusyawaratan dari seluruh pihak tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Dalam rangka mewujudkan penta helix model secara optimal perlu dibentuk wadah dalam bentuk forum semi formal, sehingga tingkatan informalitas dan cairnya konsep penta helix tersebut dapat diikat dalam suatu sistem. Sistem berikutnya diantaranya dapat dilihat dari bagaimana peran regulasi dari pemerintah mampu mengikat kerjasama dan komunikasi yang intens serta terarah dari seluruh pihak yang terdapat dalam penta helix model tersebut.

PENUTUP

Tercatat 5 (lima) permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan desa yaitu terbatasnya anggaran, perpustakaan desa belum dikenal secara meluas oleh masyarakat setempat, kurang memadainya sumber daya manusia pengelola perpustakaan baik secara jumlah maupun kualitas, akses informasi yang masih sulit diakses oleh masyarakat desa, pembinaan perpustakaan desa belum diselenggarakan secara optimal. Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan desa menyelenggarakan fungsinya adalah tantangan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Cepatnya perkembangan teknologi tersebut menuntut pengelola perpustakaan untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam upaya penyelenggaraan perpustakaan desa disarankan untuk menggunakan konsep penta helix yang mensinergikan kelima elemen diantaranya

elemen akademisi, pemerintah, sektor bisnis, komunitas, dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, H. N., & Randika. (2022). *Pengelolaan Perpustakaan Desa Bina Mandiri Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar* [Unigal].
[Http://Repository.Unigal.Ac.Id:8080/Handle/123456789/2153](http://Repository.Unigal.Ac.Id:8080/Handle/123456789/2153)
- Asnawi. (2015). Perpustakaan Desa Sebagai Sumber Layanan Informasi Utama. *Media Pustakawan*, 22(3).
<https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/210>
- Diana. (2022). *Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian Pada Perpustakaan Desa Simpang Utama Kabupaten Bener Meriah)* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh].
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20131/1/Diana,%20190503156,%20FAH,%20IP,%20082277262954.pdf>
- Frandyana, A. (2021). *Implementasi Peraturan Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Desa Manuk Ponorogo* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo].
<http://eprints.umpo.ac.id/6863/>
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 02.
<https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>
- Hemanto, B. (2015). Optimalisasi Perpustakaan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Pustaka Ilmiah*.

- <https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/download/33098/21846>
- Indriyanti, M., & Ahwan, M. A. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Layanan Informasi Terseleksi Perpustakaan Desa dengan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Daluang: Journal of Library and Information Science*, 1(2).
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/daluang/article/view/8008/3650>
- Kristyanto, D., Fahriyah, & Shintawati, Y. (2022). Optimalisasi Perpustakaan Desa Dalam Upaya Pengembangan Produk Pertanian Oleh Warga di Dusun Suco Desa Pengampon Kabupaten Jombang. *BERDAYA*, 1(1).
<https://journalng.uwks.ac.id/index.php/berdaya/article/view/11/9>
- Mardiyanto, V. (2020). *Kajian Model Pemberdayaan, masyarakat Pesisir Banten Lama Melalui Pendekatan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kecamatan Kasemen Kota Serang* [UIN BANTEN].
<http://repository.uinbanten.ac.id/>
- Maskurotunitsa, R. S., & Rohmiyati, Y. (2016). Peran Perpustakaan Desa “Mutiar” Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(4).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15335>
- Merdeka, W. (2021). *Perpusnas Luncurkan Program Transformasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Berbasis Inklusi Sosial*. Berita Perpustakaan Nasional.
<https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=210618030848Y4GdfMeVST>
- Merdeka, W. (2022). *Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa*. Berita Perpustakaan Nasional.
<https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=220620122205x6zUoq8adB>
- Musa, N. (2019). *Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Komunitas*. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Retrieved November 9, 2022, from <https://um-tapsel.ac.id/opini/read/1491114147>
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda. (2019). Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 “Communication and Information Beyond Boundaries.”*
https://www.researchgate.net/profile/Rani-Rachman/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang/links/5e365dad458515072d76ecad/Strategi-Sukses-Transformasi-Perpustakaan-Desa-Berbasis-Inklusi-Sosial-untuk-Masyarakat-Sejahtera-Studi-Pada-Perpustakaan-Desa-Gampingan-Gemar-Membaca-Malang.pdf
- Ramayanti, R. (2021). Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Pandan Baiduri” Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 27(01).
<http://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/view/51/36>
- Rodiah, S., Budiono, A., & Komariah, N. (2018). Penguatan peran perpustakaan desa dalam diseminasi informasi kesehatan lingkungan. *Dharmakarya*, 7(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v6i3.19350>

- Rohman, A. S., Erwina, W., & Lusiana, E. (2018). Transformasi Perpustakaan Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sari, D. P., & Rohmiyati, Y. (2017). Peran Pembinaan Perpustakaan Pada Eksistensi Perpustakaan Desa Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23179>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sukoco, J. B. (2019). Administrasi Pendidikan Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa. *Jurnal Mitra Pendidikan (JM P Online)*, 3(3).
<http://ejournalmitrapendidikan.com/index.php/e-jmp/article/view/511/316>
- Suprihatin, E. W. (2021). Desain Sistem Informasi Perpustakaan Desa Dalam Rangka Mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Media Pustakawan*, 28(3).
<https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/1022>
- Sutarno. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Sagung Seto.
- Widayanto, M. T., & Jatiadi, T. K. D. (2020). Optimalisasi Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Budaya Literasi di Desa Jatiadi, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 2(1).
<https://forum.upbatam.ac.id/index.php/jpkm/article/view/1640/1016>
- Wulansari, A., Sumaryanti, L., Syam, A. R., Laksana, S. D., & Asih, A. (2021). Dampak Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Publis Journal*, 5(2).
<https://doi.org/10.24269/pls.v5i2.4805>
- Yuliasri, W. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan* [Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik].
<https://repository.uir.ac.id/11353/1/177310419.pdf>
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1).
<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfah, M. A., & Aisa, A. (2018). Transformasi Perpustakaan Desa (Studi Kasus Di Perpustakaan Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Seminar Nasional Multidisiplin 2018*.
<https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/289/245>